

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA PERIODE TAHUN 2025

BAB I PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penilaian Tata Kelola dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.

Maka PT. BPR Sabar Artha Prima telah merealisasikan pembuatan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan antara lain kondisi keuangan, keputusan, kebijakan dan pelayanan yang diungkapkan secara jelas akurat dan tepat waktu.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Setiap unit kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas termasuk kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing personal

yang selaras dengan visi, misi dan strategi BPR.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR harus berprgang pada prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta terbebas dari benturan kepentingan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

BAB II

FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Sabar Artha Prima disusun selaras dengan Pasal 102 POJK Nomor 9 Tahun 2024 dimana BPR wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, berikut adalah pokok-pokok isi Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2025 :

- a. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola
- b. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola :
 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.
 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
- c. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisari pada BPR.
 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisari pada BPR.
 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- g. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.
- h. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.
- i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun
- j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- k. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).
- l. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.
- m. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- n. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.

BAB III
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	Jl. Slamet Riyadi No. 38 Surakarta
Nomor Telepon	0271-665899-656763
Penjelasan Umum	PT BPR Sabar Artha Prima merupakan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Modal inti BPR per 31 Desember 2025 sebesar Rp.7.295.470.831,- dengan total aset sebesar Rp. 76.058.015.095,- dan jumlah Direksi sebanyak 1 orang, , serta jumlah Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Berdasarkan penilaian pelaksanaan tata kelola pada PT BPR Sabar Artha Prima secara umum memiliki peringkat komposit 3 (Cukup), meskipun pelaksanaannya belum sempurna atau optimal tetapi kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan tata kelola tidak begitu signifikan dan masih dalam batas wajar.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :

Disetujui sesuai dengan Akta Notaris No. 07 tanggal 24 November 2025, perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 3313010904800003
	Nama : Sunaryo, SE (Menjabat sejak 24 November 2025)
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Direksi menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan kepada pemegang saham dan RUPS
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.
- d. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bagian SDM, Operasional dan SPI.
- e. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis.
- f. Mengelola Bank agar dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi Bank yang sehat, Bank yang kuat menghadapi persaingan dan terpercaya di masyarakat sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban Bank.
- g. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.
- h. Bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan pada BPR dan membuat laporan tentang pokok-pokok pelaksanaan tugas Kepatuhan.
- i. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Bank.
- j. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- k. Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala.
- l. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
- m. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Management Risiko secara tertulis.
- n. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jajaran organisasi.
- o. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independent.
- p. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Eksposur risiko yang dilakukan BPR secara keseluruhan.
- q. Menyusun kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme.
- r. Menerapkan program APU dan PPT baik di kantor Pusat maupun kantor cabang.
- s. Memastikan bahwa aktivitas Bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan OJK serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.

	<p>t. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank secara berkala.</p> <p>u. Menjaga tingkat Kesehatan Bank.</p> <p>v. Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan Bank.</p> <p>w. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank (RBB jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang).</p> <p>x. Membuat standar operasional Bank mengenai semua proses operasional, produk-produk dan ketentuan-ketentuan baru.</p> <p>y. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP Bank.</p> <p>z. Bertanggungjawab pada pengembangan kualitas SDM dan produk-produk Bank.</p>
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : 3313071309820001</p> <p>Nama : Wawan Joko Prasajo (Menjabat sampai 24 November 2025)</p> <p>Jabatan : Direktur Utama Sekaligus Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR</p> <p>b. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bagian SDM, Operasional dan SPI.</p> <p>c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.</p> <p>d. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis.</p> <p>e. Bersama dengan jajaran Direksi yang lain mengelola Bank agar dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi Bank yang sehat, Bank yang kuat menghadapi persaingan dan terpercaya di masyarakat sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban Bank.</p> <p>f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat</p>

	<p>kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.</p> <p>g. Bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan pada BPR dan membuat laporan tentang pokok-pokok pelaksanaan tugas Kepatuhan.</p> <p>h. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Bank.</p> <p>i. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>j. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris.</p> <p>k. Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala.</p> <p>l. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</p> <p>m. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>n. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.</p> <p>o. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Management Risiko secara tertulis.</p> <p>p. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> <p>q. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jajaran organisasi.</p> <p>r. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independent.</p> <p>s. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Eksposur risiko yang dilakukan BPR secara keseluruhan.</p> <p>t. Direksi wajib menyusun kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme.</p> <p>u. Direksi Kepatuhan sebagai penanggungjawab penerapan program APU dan PPT baik di kantor Pusat maupun kantor cabang.</p> <p>v. Memastikan bahwa aktivitas Bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan OJK serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.</p> <p>w. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank secara berkala.</p> <p>x. Bersama-sama dengan Jajaran Direksi menjaga tingkat Kesehatan Bank.</p>						
2.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="327 1751 730 1805">NIK</td> <td data-bbox="730 1751 1490 1805">: 3372022308610001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1805 730 1917">Nama</td> <td data-bbox="730 1805 1490 1917">: Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1917 730 1953">Jabatan</td> <td data-bbox="730 1917 1490 1953">: Direktur</td> </tr> </table>	NIK	: 3372022308610001	Nama	: Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)	Jabatan	: Direktur
NIK	: 3372022308610001						
Nama	: Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)						
Jabatan	: Direktur						

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.
- b. Bersama dengan jajaran Direksi yang lain mengelola Bank agar Bank dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi Bank yang sehat, Bank yang kuat menghadapi persaingan dan terpercaya di masyarakat sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban bank.
- c. Menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
- d. Mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan kepada pemegang saham dan RUPS.
- e. Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan Bank.
- f. Bersama dengan bagian terkait mengembangkan produk-produk Bank.
- g. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.
- h. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank (RBB jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang).
- i. Membuat standar operasional Bank mengenai semua proses operasional, produk-produk dan ketentuan-ketentuan baru.
- j. Membuat strategi dalam pemenuhan target Bank dengan cara bagaimana mencapai target tersebut.
- k. Mengecek dan mengawasi semua kegiatan operasional Bank.
- l. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP Bank.
- m. Bertanggungjawab pada pengembangan kualitas SDM dan produk produk Bank.
- n. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada Direktur Utama.
- o. Menyampaikan laporan-laporan kepada Pemegang Saham.
- p. Menetapkan kebijakan-kebijakan Bank.
- q. Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis Bank.
- r. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris / Direktur Utama perkembangan Kredit maupun Dana serta mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali untuk mengambil langkah-langkah perbaikan ke depan.
- s. Menggalang kerjasama yang baik dengan nasabah deposan, penabung, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dinas/Instansi terkait dengan organisasi-organisasi yang lain.
- t. Melakukan peninjauan / pengontrolan terhadap nasabah kredit dan melakukan

	<p>penagihan-penagihan bersama bersama petugas Kredit.</p> <p>u. Bersama-sama dengan jajaran kredit menekan serendah mungkin tunggakan dan Non Performing Loan (NPL).</p> <p>v. Bersama-sama dengan Jajaran Direksi menjaga tingkat Kesehatan Bank.</p>
--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, dengan realisasi pencapaian RBB tahun 2025 serta pelaksanaan komitmen hasil pemeriksaan Audit Internal yang dilakukan selama tahun 2025.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris :

Disetujui sesuai dengan Akta Notaris No. 07 tanggal 24 November 2025, perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 3372022406820003</p> <p>Nama : Herry Santoso</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Komisaris wajib dengan itikad baik kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan BPR.</p> <p>d. Memberikan Laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.</p> <p>e. Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman serta berhak memeriksa uang kas dll serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi.</p> <p>f. Perseroan meminjam uang ke pihak lain harus dengan Persetujuan Komisaris.</p> <p>g. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.</p>

	<p>h. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.</p> <p>i. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>k. Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.</p> <p>l. Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR terkecuali ketentuan BMPK.</p> <p>m. Komisaris melakukan pengawasan aktif dalam hal APU/PPT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU/PPT yang diusulkan oleh Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT. 3) Memastikan adanya pembahasan terkait APU/PPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. <p>n. Komisaris wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda Rencana Bisnis BPR, isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, penetapan rencana bisnis 1 tahun sekali.</p> <p>o. Memimpin Bank apabila Direktur dan Direksi berhalangan / tidak ada.</p> <p>p. Memberhentikan sementara waktu jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <p>q. Melakukan pengawasan dan <i>on the spot</i> terhadap nasabah kredit dan dana.</p> <p>r. Membuat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 (enam) bulan sekali perkembangan jalannya Perseroan.</p> <p>s. Melakukan kunjungan kepada Nasabah Macet dengan mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.</p>
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 3372042406750007</p> <p>Nama : Han Purnomo (Menjabat sampai 24 November 2025)</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan</p>

BPR.

- b. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Komisaris Utama wajib dengan itikad baik kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan BPR.
- d. Memberikan Laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
- e. Komisaris Utama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman serta berhak memeriksa uang kas dll serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi.
- f. Perseroan meminjam uang ke pihak lain harus dengan Persetujuan Komisaris Utama.
- g. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
- h. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
- i. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.
- j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.
- k. Komisaris Utama wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
- l. Komisaris Utama dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR terkecuali ketentuan BMPK.
- m. Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif dalam hal APU/PPT :
 - 1) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU/PPT yang diusulkan oleh Direksi.
 - 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT.
 - 3) Memastikan adanya pembahasan terkait APU/PPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- n. Komisaris Utama wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda Rencana Bisnis BPR, isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, penetapan rencana bisnis 1 tahun sekali.
- o. Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direksi berhalangan / tidak ada.
- p. Memberhentikan sementara waktu jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

<p>q. Melakukan pengawasan dan <i>on the spot</i> terhadap nasabah kredit dan dana.</p> <p>r. Membuat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 (enam) bulan sekali perkembangan jalannya Perseroan.</p> <p>s. Melakukan kunjungan kepada Nasabah Macet dengan mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.</p>
--

<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>Dalam hal pemberian rekomendasi kepada Direksi serta menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk hadir secara teratur 2. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 4 kali dalam 1 tahun. 3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tindakan langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang ada. 4. Menyetujui pembuatan Pedoman, Kebijakan yang bermanfaat bagi operasional BPR.
--

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									

Modal inti PT BPR Sabar Artha Prima sampai dengan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.295.470.831,-, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR/S, maka PT BPR Sabar Artha Prima tidak wajib membentuk komite-komite.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3313010904800003	Sunaryo, SE (Menjabat sejak 24 November 2025)	0	0	0	0
1	3313071309820001	Wawan Joko Prasojo (Menjabat sampai 24 November 2025)	0	0	0	0
2	3372022308610001	Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3372022406820003	Herry Santoso	2.275.000.000	25.00	2.275.000.000	25.00
1	3372042406750007	Han Purnomo (Menjabat sampai 24 November 2025)	0	0	0	0

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3313010904800003	Sunaryo, SE (Menjabat sejak 24 November 2025)	-	-	-
1	3313071309820001	Wawan Joko Prasajo (Menjabat sampai 24 November 2025)	-	-	-
2	3372022308610001	Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3372022406820003	Herry Santoso	-	PT Rajaa Tunggal	31.10
1	3372042406750007	Han Purnomo (Menjabat sampai 24 November 2025)	-	-	0

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3313010904800003	Sunaryo, SE (Menjabat sejak 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1	3313071309820001	Wawan Joko Prasajo (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3372022308610001	Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan	Hubungan Keuangan		
			Anggota	Anggota	Pemegang

		Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Saham
1	3372022406820003	Herry Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Saudara Kandung
1	3372042406750007	Han Purnomo (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3313010904800003	Sunaryo, SE (Menjabat sejak 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1	3313071309820001	Wawan Joko Prasojo (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3372022308610001	Didik Darmawan Hartono (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3372022406820003	Herry Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Saudara Kandung
1	3372042406750007	Han Purnomo (Menjabat sampai 24 November 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi

Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan paket serta kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sesuai dengan pasal 102 huruf d, pasal 31 huruf c dan pasal 53 huruf c serta SEOJK Nomor 12 /SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Romawi XIV. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Butir 2 huruf g. Daftar paket / kebijakan remunerasi bagi Pengurus PT. BPR Sabar Artha Prima yang diterima dalam 1 tahun selama tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	262.000.000	2	73.000.000
2	Tunjangan	2	32.132.426	2	10.966.234
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			294.132.426		83.966.234
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			294.132.426		83.966.234

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.24 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.13 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1.63 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27 Maret 2025	2 Orang	1. Rencana Bisnis. Belum tercapainya semua target yang dalam Rencana Bisnis BPR baik Kredit yang Diberikan, Dana Pihak Ketiga, Laba-Rugi,

maupun dari tingkat Kesehatan bank (NPL, ROA, BOPO dan Cash Ratio) pada Triwulan I tahun 2025.

2. Isu strategis BPR.

- Adanya pengurangan karyawan tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan, maka direksi diharapkan bisa meminimalisir dan memitigasi dampak yang ditimbulkan atas adanya pengurangan karyawan tersebut sehingga tidak mengganggu proses operasional dan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RBB
- Pergerakan Laba/rugi yang masih fluktuatif dan potensi kerugian yang akan dialami BPR kedepan semakin besar sehingga akan semakin mempengaruhi modal BPR. Harus ada action plan dan langkah strategis yang nyata untuk menangani permasalahan tersebut dan dilaporkan ke Dewan Komisaris. Sehingga kesulitan dapat didiskusikan secara bersama-sama untuk bisa menentukan langkah-langkah strategis yang diambil untuk perbaikan kinerja BPR pada tahun 2025 ini dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RBB tahun 2025
- Pementauan pelaksanaan APU PPT dan PPSPM di BPR Sabar Artha Prima harus selalu kontinu dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah adanya indikasi transaksi terkait keuangan tunai maupun non tunai agar dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari saksi atau denda dan memastikan fungsi unit kerja khusus APU PPT dan PPSPM pada masing-masing kantor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Untuk mengurangi dan efisiensi biaya operasional telah dilakukan antara lain dengan adanya pengurangan karyawan, penghematan dan pemotongan pos-pos biaya agar kerugian tidak semakin besar. Selain itu agar dilakukan review dan penilaian terhadap kinerja semua kantor cabang dan kantor kas, sebagai pertimbangan untuk dilakukan penutupan untuk mengurangi biaya operasional agar minus laba dapat ditekan dengan adanya efisiensi biaya.
- Perkembangan penjualan AYDA atas nama Robby Cahyadi sebesar 1.150.000.000 yang sudah masuk AYDA sejak 29 September 2017 belum adanya penyelesaian sampai hari ini, padahal sudah jatuh tempo pada tanggal 29 September 2022. Meskipun telah bekerjasama dengan agen-agen perumahan untuk melakukan penjualan AYDA, monitoring perkembangan penjualan oleh agen agar aset yang masuk ke AYDA dapat segera dijual, juga pemberian harga yang wajar dan tidak merugikan pihak BPR Sabar Artha Prima. AYDA yang kedua adalah atas nama Hanifah Kurniasih tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 499.648.500,-. Karena kedua AYDA tersebut apabila tidak segera dilakukan penyelesaian akan berpengaruh kepada kekuatan modal BPR.
- Pelampauan akibat adanya penurunan modal yang disebabkan oleh AYDA yang belum terselesaikan dan kerugian yang dialami BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani atas permasalahan tersebut. Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk proses penyelesaian pelampauan BMPK adalah sebagai berikut :

No	Debitur	Baki Debit Awal	Baki Debit Akhir	Penyelesaian
1	Harjono, SH	2.688.104.400,-	1.292.831.800,-	697.636.300,-

2	Halim WM	2.170.718.100,-	1.170.718.100,-	1.000.000.000,-
---	----------	-----------------	-----------------	-----------------

- Terdapat pelanggaran BMPK sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

No	Debitur	Baki Debit	Modal	Pelanggaran
1	Lura Ida	1.687.213.400,-	1.432.673.163,-	254.540.237,-

- Pemegang saham ada rencana untuk menjual seluruh saham BPR, karena pemegang saham sudah tidak sanggup atau berkenan untuk melakukan penyetoran modal kembali untuk memperkuat permodalan BPR yang mengalami penurunan permodalan

3. Evaluasi Kebijakan Strategis.

- Direksi telah menyusun RBB tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana asset yang ingin dicapai sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 98.043.791.477,- dengan R/L sebesar Rp. 221.270.793,- .Dan pencapaian sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 adalah untuk asset sebesar Rp. 89.918.037.789,- dan untuk R/L sebesar Rp.62.860.391,- Ada tugas berat dan PR yang banyak untuk Direksi dalam menyusun rencana kerja yang lebih konkrit, terutama penurunan NPL kredit dan memaksimalkan laba lewat pencairan kredit yang tetap prudent. Sampai saat ini pencapaian target dari RBB masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan terobosan dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja BPR agar target RBB bisa tercapai
- Pengurangan karyawan terutama posisi Marketing Kredit di setiap kantor (baik pusat & cabang) menyebabkan penyaluran kredit tidak optimal sehingga akan mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB. Untuk itu diharapkan Marketing Kredit yang masih ada tetap mencapai target penyaluran kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- Pemberian Restrukturisasi Kredit kepada debitur yang menunggak angsuran harus benar-benar memperhatikan kondisi debitur, apakah debitur masih ada kemampuan bayar, usaha debitur masih berjalan dan debitur yang masih mempunyai niat baik dan berkomitmen untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya, maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit sesuai aturan yang ada. Akan tetapi jika memang usaha sudah tidak ada dan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam membayar angsuran setiap bulannya, hendaknya dipikirkan penanganan penyelesaian kreditnya. Selain itu juga dimonitor kolektibilitas debitur setelah proses restrukturisasi, pastikan kolektibilitas setelah restrukturisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong diragukan atau macet dan tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar
- Kondisi NPL yang masih tinggi dan kerugian yang semakin bertambah menjadi warning kepada dewan direksi untuk menentukan atau membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut karena akan mempengaruhi modal BPR dan likuiditas BPR. Lakukan penagihan dengan skala prioritas dan secara intensif untuk menurunkan NPL dan

			<p>lakukan review terhadap semua biaya operasional, review suku bunga dana pihak ketiga dan review suku bunga kredit untuk mengurangi jumlah beban dan meningkatkan pendapatan sehingga akan berpengaruh terhadap kerugian BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Pelampauan dan pelanggaran BMPK akibat adanya penurunan modal BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Karena pelampauan BMPK sudah melebihi batas waktu komitmen penyelesaian pelampauan BMPK kepada otoritas <p>4. Evaluasi Realisasi RBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan debitur-debitur bermasalah perlu terus-menerus ditangani secara kontinu oleh pihak Direksi, Manager Remedial, Pimpinan Cabang, dan bagian Penagihan. Meskipun sudah ada beberapa nasabah kredit macet yang terselesaikan dan terjadi penurunan jumlah NPL Gross, dimana pencapaian NPL per tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar 36,31%, masih di atas dari target NPL Proyeksi RBB triwulan pertama tahun 2025 sebesar 32,12%,. Kinerja team Remedial perlu terus ditingkatkan dan Direksi yang memantau penyelesaian kredit bermasalah hendaknya segera membuat Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah tersebut dan dilaporkan secara rutin ke Dewan Komisaris - Per tanggal 28 Februari 2025, NPL Kantor Pusat sebesar 31,26%, Kantor Cabang Klaten sebesar 15,19%, Kantor Cabang Sragen sebesar 38,18%, Kantor Cabang Boyolali sebesar 35,06%, dan Kantor Cabang Magelang sebesar 74,91%. Hendaknya ini menjadi warning untuk Direksi memikirkan apakah penanganan Kredit bermasalah yang dilakukan sudah tepat, karenakan NPL yang besar disemua kantor. Terutama untuk Kantor Cabang Magelang, Pimpinan Cabangnya sudah mencapai usia 58 tahun dan sudah lewat masa pensiun. Regenerasi untuk Kantor Cabang Magelang dirasa perlu dilakukan, mengingat Kantor Cabang Magelang jauh dari Solo sehingga jika terjadi sesuatu, akan sulit monitoringnya - Pencapaian Kredit yang belum optimal apalagi dengan terbatasnya jumlah Marketing Kredit yang ada hendaknya menjadi PR buat Direksi dalam memikirkan Inovasi Product Kredit yang ada, apakah masih menarik calon debitur untuk mengajukan pinjaman, baik dari suku bunga, biaya, dll. Lalu sarana promosi yang dirasa masih kurang, hendaknya dipikirkan, sarana promosi yang berbiaya rendah dapat dilakukan dengan memanfaatkan social media, baik Instagram, Facebook, Whatsapp dll - Suku Bunga Penjaminan oleh LPS, suku bunga Deposito dan biaya operasional hendaknya menjadi perhatian dan penilaian Direksi dalam menentukan suku bunga pemberian Kredit Yang Diberikan (KYD). Jangan sampai pemberian bunga Kredit yang terlalu murah tanpa diperhitungkan, akan menjadi kerugian bagi BPR nantinya. Terutama Kredit AKUR yang menjadi andalan bagi BPR Sabar Artha Prima, yang memiliki bunga cenderung rendah. Lakukan penjualan kredit dengan bunga annuitas untuk meningkatkan pendapatan bunga. Karena pendapatan utama BPR adalah dari pendapatan bunga kredit yang diberikan oleh BPR - Penilaian kinerja sudah berjalan hampir sampai akhir triwulan pertama tahun 2025, masih banyak PR yang harus dipikirkan oleh Direksi, pencapaian target kinerja yang belum tercapai, NPL yang masih tinggi, target Laba yang masih sangat jauh,
--	--	--	---

			hendaknya menjadi PR bagi Direksi dan seluruh karyawan agar bekerja lebih maksimal, agar target proyeksi RBB tahun 2025 dapat tercapai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, hendaknya ada langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang nyata agar BPR Sabar Artha Prima dapat lebih maju dan berkembang serta mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RBB
2	05 Juni 2025	2 Orang	<p>1. Rencana Bisnis.</p> <p>Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terdapat target yang telah tertuang dalam RBB tahun 2025 sudah mencapai target adalah laba/rugi, selain itu belum ada yang tercapai misalnya kredit, dan tabungan, sedangkan untuk deposito, Tingkat Kesehatan bank belum tercapai kecuali rasio CR.</p> <p>2. Isu Strategis BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengurangan karyawan terutama bagian marketing tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam RBB, maka Direksi diharapkan bisa meminimalisir dan memitigasi dampak yang ditimbulkan atas adanya pengurangan karyawan tersebut sehingga tidak mengganggu proses operasional dan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RBB - Pergerakan Laba/Rugi yang masih fluktuatif dan cenderung mengarah kepada kerugian serta potensi kerugian yang akan dialami BPR kedepan semakin besar sehingga akan semakin mempengaruhi modal BPR. Harus adanya Action Plan dan langkah strategis yang nyata untuk menangani permasalahan tersebut dan dilaporkan ke Dewan Komisaris. Sehingga kesulitan dapat didiskusikan secara bersama-sama untuk bisa menentukan langkah-langkah strategis yang diambil untuk perbaikan kinerja BPR pada tahun 2025 ini dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RBB tahun 2025 - Pemantauan pelaksanaan APU-PPT dan PPSPM di BPR Sabar Artha Prima harus selalu kontinu dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah adanya indikasi transaksi yang berkaitan dengan APU PPT dan PPSPM. Selain itu pelaporan terkait transaksi keuangan tunai maupun nontunai agar dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari sanksi atau denda serta memastikan fungsi unit kerja khusus APU-PPT dan PPSPM pada masing-masing kantor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku - Untuk mengurangi dan efisiensi biaya operasional telah dilakukan antara lain dengan adanya pengurangan karyawan, penghematan dan pemotongan pos-pos biaya agar kerugian tidak semakin besar. Selain itu agar dilakukan review dan penilaian terhadap kinerja semua kantor cabang dan kantor kas, sebagai pertimbangan untuk dilakukan penutupan untuk mengurangi biaya operasional agar minus laba dapat ditekan dengan adanya efisiensi biaya - Perkembangan penjualan AYDA atas nama Robby Cahyadi sebesar Rp.1.150.000.000,- yang sudah masuk ke AYDA sejak 29 September 2017 belum adanya penyelesaian sampai hari ini, padahal sudah jatuh tempo pada tgl 29 September 2022. Meskipun telah bekerjasama dengan Agen-agen Perumahan untuk melakukan penjualan AYDA, monitoring perkembangan penjualan oleh agen agar asset yang masuk ke AYDA dapat segera dijual, juga pemberian harga yang wajar dan tidak merugikan pihak BPR Sabar Artha Prima. AYDA yang kedua

			<p>adalah atas nama Hanifah Kurniasih tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 499.648.500,-. Karena kedua AYDA tersebut apabila tidak segera dilakukan penyelesaian akan berpengaruh kepada kekuatan modal BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian AYDA atas nama Robby Cahyadi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarget maksimal Bulan September 2025, sehingga masih ada waktu sekitar 4 bulan kedepan untuk penyelesaian AYDA tersebut. Hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Direksi untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian AYDA tersebut - Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal yang disebabkan oleh AYDA yang belum terselesaikan dan kerugian yang dialami BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga tidak melebihi batas komitmen penyelesaian pelampauan BMPK yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Pemegang saham ada rencana untuk menjual seluruh atau sebagian saham BPR, karena pemegang saham sudah tidak sanggup atau berkenan untuk melakukan penyeteroran modal kembali untuk memperkuat permodalan BPR yang mengalami penurunan permodalan <p>3. Evaluasi Kebijakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun RBB tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana asset yang ingin dicapai sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 98.043.791.477,- dengan R/L sebesar Rp. 221.270.793,- .Dan pencapaian sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 adalah untuk asset sebesar Rp. 86.292.231.827,- dan untuk R/L sebesar (Rp.22.636.778,-). Ada tugas berat dan PR yang banyak untuk Direksi dalam menyusun rencana kerja yang lebih konkrit, terutama penurunan NPL kredit dan memaksimalkan laba lewat pencairan kredit yang tetap prudent. Sampai saat ini pencapaian target dari RBB masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan terobosan dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja BPR agar target RBB bisa tercapai - Pengurangan karyawan terutama posisi Marketing Kredit di kantor pusat dan tidak adanya marketing di kantor cabang menyebabkan penyaluran kredit tidak optimal sehingga akan mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB. Untuk itu diharapkan Marketing Kredit yang masih ada tetap mencapai target penyaluran kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan - Pemberian Restrukturisasi Kredit kepada debitur yang menunggak angsuran harus benar-benar memperhatikan kondisi debitur, apakah debitur masih ada kemampuan bayar, usaha debitur masih berjalan dan debitur yang masih mempunyai niat baik dan berkomitmen untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya, maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit sesuai aturan yang ada. Akan tetapi jika memang usaha sudah tidak ada dan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam membayar angsuran setiap bulannya, hendaknya dipikirkan penanganan penyelesaian kreditnya. Selain itu juga dimonitor kolektibilitas debitur setelah proses restrukturisasi, pastikan kolektibilitas setelah restrukturisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong diragukan atau macet dan tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong lancar, dalam
--	--	--	---

			<p>perhatian khusus, atau kurang lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi NPL yang masih tinggi dan kerugian yang semakin bertambah menjadi warning kepada Direksi untuk menentukan atau membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut karena akan mempengaruhi modal BPR dan likuiditas BPR. Lakukan penagihan dengan skala prioritas dan secara intensif untuk menurunkan NPL dan lakukan review terhadap semua biaya operasional, review suku bunga dana pihak ketiga dan review suku bunga kredit untuk mengurangi jumlah beban dan meningkatkan pendapatan sehingga akan berpengaruh terhadap kerugian BPR - Penyelesaian Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Agar tidak melebihi batas waktu komitmen penyelesaian pelampauan BMPK kepada otoritas <p>4. Evaluasi Realisasi RBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan debitur-debitur bermasalah perlu terus-menerus ditangani secara kontinu oleh pihak Direksi, Manager Remedial, Pimpinan Cabang, dan bagian Penagihan. Meskipun sudah ada beberapa nasabah kredit macet yang terselesaikan tetapi terjadi kenaikan jumlah NPL Gross, dimana pencapaian NPL per tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 42,39%, masih di atas dari target NPL Proyeksi RBB triwulan kedua tahun 2025 sebesar 27,69%,. Kinerja team Remedial perlu terus ditingkatkan dan Direksi yang memantau penyelesaian kredit bermasalah hendaknya segera membuat Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah tersebut dan dilaporkan secara rutin ke Dewan Komisaris - Per tanggal 31 Mei 2025, NPL Kantor Pusat sebesar 34,24% naik dari posisi 30 April 2025 sebesar 32,52%, Kantor Cabang Klaten sebesar 39,06% naik dari posisi 30 April 2025 sebesar 38,84%, Kantor Cabang Sragen sebesar 49,80% naik dari posisi 30 April 2025 sebesar 42,85%, Kantor Cabang Boyolali sebesar 44,64% naik dari posisi 30 April 2025 sebesar 37,55%, dan Kantor Cabang Magelang sebesar 79,29% naik dari posisi 30 April 2025 sebesar 77,18%. Hendaknya ini menjadi warning untuk Direksi memikirkan apakah penanganan Kredit bermasalah yang dilakukan sudah tepat, karenakan NPL yang besar disemua kantor dan terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya - Pencapaian Kredit yang belum optimal apalagi dengan terbatasnya jumlah Marketing Kredit yang ada hendaknya menjadi PR buat Direksi dalam memikirkan Inovasi Product Kredit yang ada, apakah masih menarik calon debitur untuk mengajukan pinjaman, baik dari suku bunga, biaya, dll. Lalu sarana promosi yang dirasa masih kurang, hendaknya dipikirkan, sarana promosi yang berbiaya rendah dapat dilakukan dengan memanfaatkan social media, baik Instagram, Facebook, Whatsapp dll - Suku Bunga Penjaminan oleh LPS, suku bunga Deposito dan biaya operasional hendaknya menjadi perhatian dan penilaian Direksi dalam menentukan suku bunga pemberian Kredit Yang Diberikan (KYD). Jangan sampai pemberian bunga Kredit yang terlalu murah tanpa diperhitungkan, akan menjadi kerugian bagi BPR nantinya. Terutama Kredit AKUR yang menjadi andalan bagi BPR Sabar Artha Prima, yang memiliki bunga cenderung rendah. Lakukan penjualan kredit dengan bunga annuitas untuk meningkatkan pendapatan bunga. Karena pendapatan utama BPR adalah dari pendapatan bunga
--	--	--	--

			<p> kredit yang diberikan oleh BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> – Penilaian kinerja sudah berjalan hampir sampai akhir triwulan kedua tahun 2025, masih banyak PR yang harus dipikirkan oleh Direksi, pencapaian target kinerja yang belum tercapai, NPL yang masih tinggi, target Laba yang masih sangat jauh, hendaknya menjadi PR bagi Direksi dan seluruh karyawan agar bekerja lebih maksimal, agar target proyeksi RBB tahun 2025 dapat tercapai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, hendaknya ada langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang nyata agar BPR Sabar Artha Prima dapat lebih maju dan berkembang serta mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RBB
3	09 September 2025	1 Orang	<p>1. Rencana Bisnis.</p> <p>Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 beberapa target yang telah tertuang dalam RBB tahun 2025 belum ada yang mencapai target seperti kredit, tabungan dan deposito, Laba-Rugi maupun Tingkat Kesehatan bank belum tercapai kecuali rasio LDR.</p> <p>2. Isu Strategis BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pergerakan Laba/Rugi yang masih fluktuatif dan cenderung mengarah kepada kerugian serta potensi kerugian yang akan dialami BPR kedepan semakin besar sehingga akan semakin mempengaruhi modal BPR. Harus adanya Action Plan dan langkah strategis yang nyata untuk menangani permasalahan tersebut dan dilaporkan ke Dewan Komisaris. Sehingga kesulitan dapat didiskusikan secara bersama-sama untuk bisa menentukan langkah-langkah strategis yang diambil untuk perbaikan kinerja BPR pada tahun 2025 ini dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RBB tahun 2025 – Pemantauan pelaksanaan APU-PPT dan PPSPM di BPR Sabar Artha Prima harus selalu kontinu dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah adanya indikasi transaksi yang berkaitan dengan APU PPT dan PPSPM. Selain itu pelaporan terkait transaksi keuangan tunai maupun nontunai agar dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari sanksi atau denda serta memastikan fungsi unit kerja khusus APU-PPT dan PPSPM pada masing-masing kantor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku – Untuk mengurangi dan efisiensi biaya operasional telah dilakukan antara lain dengan adanya pengurangan karyawan, penghematan dan pemotongan pos-pos biaya agar kerugian tidak semakin besar. Selain itu agar dilakukan review dan penilaian terhadap kinerja semua kantor cabang dan kantor kas, sebagai pertimbangan untuk dilakukan penutupan untuk mengurangi biaya operasional agar minus laba dapat ditekan dengan adanya efisiensi biaya – Perkembangan penjualan AYDA atas nama Robby Cahyadi sebesar Rp.1.150.000.000,- yang sudah masuk ke AYDA sejak 29 September 2017 belum adanya penyelesaian sampai hari ini, padahal sudah jatuh tempo pada tgl 29 September 2022. Meskipun telah bekerjasama dengan Agen-agen Perumahan untuk melakukan penjualan AYDA, monitoring perkembangan

			<p>penjualan oleh agen agar asset yang masuk ke AYDA dapat segera dijual, juga pemberian harga yang wajar dan tidak merugikan pihak BPR Sabar Artha Prima. AYDA yang kedua adalah atas nama Hanifah Kurniasih tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 499.648.500,-. Karena kedua AYDA tersebut apabila tidak segera dilakukan penyelesaian akan berpengaruh kepada kekuatan modal BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian AYDA atas nama Robby Cahyadi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarget maksimal Bulan September 2025, sehingga bulan ini harus bisa selesai. Hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Direksi untuk mempercepat penyelesaian AYDA tersebut - Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal yang disebabkan oleh AYDA yang belum terselesaikan dan kerugian yang dialami BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga tidak melebihi batas komitmen penyelesaian pelampauan BMPK yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Pemegang saham ada rencana untuk menjual seluruh atau sebagian saham BPR, karena pemegang saham sudah tidak sanggup atau berkenan untuk melakukan penyeteroran modal kembali untuk memperkuat permodalan BPR yang mengalami penurunan permodalan <p>3. Evaluasi Kebijakan Strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun RBB tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana asset yang ingin dicapai sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 98.043.791.477,- dengan R/L sebesar Rp. 221.270.793,- .Dan pencapaian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 adalah untuk asset sebesar Rp. 79.102.908.960,- dan untuk R/L sebesar (Rp.87.789.453,-). Ada tugas berat dan PR yang banyak untuk Direksi dalam menyusun rencana kerja yang lebih konkrit, terutama penurunan NPL kredit dan memaksimalkan laba lewat pencairan kredit yang tetap prudent. Sampai saat ini pencapaian target dari RBB masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan terobosan dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja BPR agar target RBB bisa tercapai - Pemberian Restrukturisasi Kredit kepada debitur yang menunggak angsuran harus benar-benar memperhatikan kondisi debitur, apakah debitur masih ada kemampuan bayar, usaha debitur masih berjalan dan debitur yang masih mempunyai niat baik dan berkomitmen untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya, maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit sesuai aturan yang ada. Akan tetapi jika memang usaha sudah tidak ada dan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam membayar angsuran setiap bulannya, hendaknya dipikirkan penanganan penyelesaian kreditnya. Selain itu juga dimonitor kolektibilitas debitur setelah proses restrukturisasi, pastikan kolektibilitas setelah restrukturisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong diragukan atau macet dan tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum dilakukan
--	--	--	---

			<p>Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi NPL yang masih tinggi dan kerugian yang semakin bertambah menjadi warning kepada Direksi untuk menentukan atau membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut karena akan mempengaruhi modal BPR dan likuiditas BPR. Lakukan penagihan dengan skala prioritas dan secara intensif untuk menurunkan NPL dan lakukan review terhadap semua biaya operasional, review suku bunga dana pihak ketiga dan review suku bunga kredit untuk mengurangi jumlah beban dan meningkatkan pendapatan sehingga akan berpengaruh terhadap kerugian BPR - Penyelesaian Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Agar tidak melebihi batas waktu komitmen penyelesaian pelampauan BMPK kepada otoritas <p>4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan debitur-debitur bermasalah perlu terus-menerus ditangani secara kontinu oleh pihak Direksi, Manager Remedial, Pimpinan Cabang, dan bagian Penagihan. Meskipun sudah ada beberapa nasabah kredit macet yang terselesaikan tetapi terjadi kenaikan jumlah NPL Gross, dimana pencapaian NPL per tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebesar 39,90%, masih di atas dari target NPL Proyeksi RBB triwulan ketiga tahun 2025 sebesar 24,08%,. Kinerja team Remedial perlu terus ditingkatkan dan Direksi yang memantau penyelesaian kredit bermasalah hendaknya segera membuat Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah tersebut dan dilaporkan secara rutin ke Dewan Komisaris - Per tanggal 31 Agustus 2025, NPL Kantor Pusat sebesar 31,59% naik dari posisi 31 Juli 2025 sebesar 31,51%, Kantor Cabang Klaten sebesar 43,77% naik dari posisi 31 Juli 2025 sebesar 45,77%, Kantor Cabang Sragen sebesar 52,27% naik dari posisi 31 Juli 2025 sebesar 52,45%, Kantor Cabang Boyolali sebesar 48,83% naik dari posisi 31 Juli 2025 sebesar 46,13%, dan Kantor Cabang Magelang sebesar 74,54% naik dari posisi 31 Juli 2025 sebesar 76,25%. Hendaknya ini menjadi warning untuk Direksi memikirkan apakah penanganan Kredit bermasalah yang dilakukan sudah tepat, karenakan NPL yang besar disemua kantor dan terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya - Pencapaian Kredit yang belum optimal apalagi dengan terbatasnya jumlah Marketing Kredit yang ada hendaknya menjadi PR buat Direksi dalam memikirkan Inovasi Product Kredit yang ada, apakah masih menarik calon debitur untuk mengajukan pinjaman, baik dari suku bunga, biaya, dll. Lalu sarana promosi yang dirasa masih kurang, hendaknya dipikirkan, sarana promosi yang berbiaya rendah dapat dilakukan dengan memanfaatkan social media, baik Instagram, Facebook, Whatsapp, dll - Suku Bunga Penjaminan oleh LPS, suku bunga Deposito dan biaya operasional hendaknya menjadi perhatian dan penilaian
--	--	--	--

			<p>Direksi dalam menentukan suku bunga pemberian Kredit Yang Diberikan (KYD). Jangan sampai pemberian bunga Kredit yang terlalu murah tanpa diperhitungkan, akan menjadi kerugian bagi BPR nantinya. Terutama Kredit AKUR yang menjadi andalan bagi BPR Sabar Artha Prima, yang memiliki bunga cenderung rendah. Lakukan penjualan kredit dengan bunga annuitas untuk meningkatkan pendapatan bunga. Karena pendapatan utama BPR adalah dari pendapatan bunga kredit yang diberikan oleh BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kinerja sudah berjalan hampir sampai akhir triwulan ketiga tahun 2025, masih banyak PR yang harus dipikirkan oleh Direksi, pencapaian target kinerja yang belum tercapai, NPL yang masih tinggi, target Laba yang masih minus / rugi, hendaknya menjadi PR bagi Direksi dan seluruh karyawan agar bekerja lebih maksimal, agar target proyeksi RBB tahun 2025 dapat tercapai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, hendaknya ada langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang nyata agar BPR Sabar Artha Prima dapat lebih maju dan berkembang serta mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RBB
4	09 Desember 2025	1 Orang	<p>1. Rencana Bisnis. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 beberapa target yang telah tertuang dalam RBB tahun 2025 sudah mencapai target labarugi. Tingkat Kesehatan bank belum tercapai kecuali rasio ROA</p> <p>2. Isu Strategis BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan Laba/Rugi yang sudah mengarah kepada keuntungan dan melampaui target yang telah ditetapkan BPR - Pemantauan pelaksanaan APU-PPT dan PPSPM di BPR Sabar Artha Prima harus selalu kontinu dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah adanya indikasi transaksi yang berkaitan dengan APU PPT dan PPSPM. Selain itu pelaporan terkait transaksi keuangan tunai maupun nontunai agar dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari sanksi atau denda serta memastikan fungsi unit kerja khusus APU-PPT dan PPSPM pada masing-masing kantor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku - Untuk mengurangi dan efisiensi biaya operasional telah dilakukan antara lain dengan adanya pengurangan karyawan, penghematan dan pemotongan pos-pos biaya agar kerugian tidak semakin besar. Selain itu agar dilakukan review dan penilaian terhadap kinerja semua kantor cabang dan kantor kas, sebagai pertimbangan untuk dilakukan penutupan untuk mengurangi biaya operasional agar minus laba dapat ditekan dengan adanya efisiensi biaya - Perkembangan penjualan AYDA atas nama Robby Cahyadi sebesar Rp.1.150.000.000,- yang sudah masuk ke AYDA sejak 29 September 2017 belum adanya penyelesaian sampai hari ini, padahal sudah jatuh tempo pada tgl 29 September 2022. Meskipun telah bekerjasama dengan Agen-agen Perumahan untuk melakukan penjualan AYDA, monitoring perkembangan penjualan oleh agen agar asset yang masuk ke AYDA dapat segera dijual, juga pemberian harga yang wajar dan tidak merugikan pihak BPR Sabar Artha Prima. AYDA yang kedua adalah atas nama Hanifah Kurniasih tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 499.648.500,-. Karena kedua AYDA tersebut

			<p>apabila tidak segera dilakukan penyelesaian akan berpengaruh kepada kekuatan modal BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian AYDA atas nama Robby Cahyadi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarget maksimal Bulan September 2025, sehingga sudah melewati batas. Diharapkan akhir tahun ini harus bisa selesai. Hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Direksi untuk mempercepat penyelesaian AYDA tersebut - Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal yang disebabkan oleh AYDA yang belum terselesaikan dan kerugian yang dialami BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga tidak melebihi batas komitmen penyelesaian pelampauan BMPK yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Pemegang saham ada rencana untuk menjual seluruh atau sebagian saham BPR, karena pemegang saham sudah tidak berkenan untuk melakukan penyeteroran modal kembali untuk memperkuat permodalan BPR yang mengalami penurunan permodalan <p>3. Evaluasi Kebijakan Strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun RBB tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana asset yang ingin dicapai sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 98.043.791.477,- dengan R/L sebesar Rp. 221.270.793,- .Dan pencapaian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 adalah untuk asset sebesar Rp. 77.051.050.972,- dan untuk R/L sebesar Rp. 449.230.045. Ada tugas berat dan PR yang banyak untuk Direksi dalam menyusun rencana kerja yang lebih konkrit, terutama penurunan NPL kredit dan memaksimalkan laba lewat pencairan kredit yang tetap prudent. Sampai saat ini pencapaian target dari RBB masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan terobosan dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja BPR agar target RBB bisa tercapai - Pemberian Restrukturisasi Kredit kepada debitur yang menunggak angsuran harus benar-benar memperhatikan kondisi debitur, apakah debitur masih ada kemampuan bayar, usaha debitur masih berjalan dan debitur yang masih mempunyai niat baik dan berkomitmen untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya, maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit sesuai aturan yang ada. Akan tetapi jika memang usaha sudah tidak ada dan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam membayar angsuran setiap bulannya, hendaknya dipikirkan penanganan penyelesaian kreditnya. Selain itu juga dimonitor kolektibilitas debitur setelah proses restrukturisasi, pastikan kolektibilitas setelah restrukturisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong diragukan atau macet dan tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar - Kondisi NPL yang masih tinggi dan kerugian yang semakin bertambah menjadi warning kepada Direksi untuk menentukan atau membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut karena akan mempengaruhi modal BPR dan likuiditas BPR. Lakukan penagihan dengan skala prioritas dan secara intensif untuk menurunkan NPL dan lakukan review terhadap semua biaya operasional, review suku bunga dana pihak ketiga dan review suku bunga kredit untuk mengurangi jumlah beban dan meningkatkan pendapatan sehingga akan
--	--	--	---

			<p>berpengaruh terhadap kerugian BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Pelampauan BMPK akibat adanya penurunan modal BPR harus segera ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Agar tidak melebihi batas waktu komitmen penyelesaian pelampauan BMPK kepada otoritas <p>4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan debitur-debitur bermasalah perlu terus-menerus ditangani secara kontinu oleh pihak Direksi, Manager Remedial, Pimpinan Cabang, dan bagian Penagihan. Meskipun sudah ada beberapa nasabah kredit macet yang terselesaikan tetapi terjadi kenaikan jumlah NPL Gross, dimana pencapaian NPL per tanggal 30 November 2025 adalah sebesar 41,89%, masih di atas dari target NPL Proyeksi RBB triwulan keempat tahun 2025 sebesar 20,61%.. Kinerja team Remedial perlu terus ditingkatkan dan Direksi yang memantau penyelesaian kredit bermasalah hendaknya segera membuat Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah tersebut dan dilaporkan secara rutin ke Dewan Komisaris - Per tanggal 30 November 2025, NPL Kantor Pusat sebesar 30,70% turun dari posisi 31 Oktober 2025 sebesar 33,41%, Kantor Cabang Klaten sebesar 53,11% naik dari posisi 31 Oktober 2025 sebesar 44,50%, Kantor Cabang Sragen sebesar 70,04% naik dari posisi 31 Oktober 2025 sebesar 55,95%, Kantor Cabang Boyolali sebesar 44,45% naik dari posisi 31 Oktober 2025 sebesar 44,42%, dan Kantor Cabang Magelang sebesar 80,90% naik dari posisi 31 Oktober 2025 sebesar 80,51%. Hendaknya ini menjadi warning untuk Direksi memikirkan apakah penanganan Kredit bermasalah yang dilakukan sudah tepat, dikarenakan NPL yang besar disemua kantor dan terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya - Pencapaian Kredit yang belum optimal apalagi dengan terbatasnya jumlah Marketing Kredit yang ada hendaknya menjadi PR buat Direksi dalam memikirkan Inovasi Product Kredit yang ada, apakah masih menarik calon debitur untuk mengajukan pinjaman, baik dari suku bunga, biaya, dll. Lalu sarana promosi yang dirasa masih kurang, hendaknya dipikirkan, sarana promosi yang berbiaya rendah dapat dilakukan dengan memanfaatkan social media, baik Instagram, Facebook, Whatsapp, dll - Suku Bunga Penjaminan oleh LPS, suku bunga Deposito dan biaya operasional hendaknya menjadi perhatian dan penilaian Direksi dalam menentukan suku bunga pemberian Kredit Yang Diberikan (KYD). Jangan sampai pemberian bunga Kredit yang terlalu murah tanpa diperhitungkan, akan menjadi kerugian bagi BPR nantinya. Terutama Kredit AKUR yang menjadi andalan bagi BPR Sabar Artha Prima, yang memiliki bunga cenderung rendah. Lakukan penjualan kredit dengan bunga annuitas untuk meningkatkan pendapatan bunga. Karena pendapatan utama BPR adalah dari pendapatan bunga kredit yang diberikan oleh BPR - Penilaian kinerja sudah berjalan hampir sampai akhir triwulan keempat tahun 2025, masih banyak PR yang harus dipikirkan oleh Direksi, pencapaian target kinerja yang belum tercapai, NPL yang masih tinggi dan kredit masih rendah hendaknya menjadi PR bagi Direksi dan seluruh karyawan agar bekerja lebih maksimal, agar target proyeksi RBB tahun 2025 dapat tercapai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, hendaknya ada langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang nyata agar BPR Sabar Artha Prima dapat lebih maju dan berkembang serta
--	--	--	---

			mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RBB
--	--	--	--

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3372042406750007	Han Purnomo	2		100 %
2	3372022406820003	Herry Santoso	4		100 %

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

- Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan.
Tidak ada internal fraud.
- Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR.
Tidak ada internal fraud yang sedang diproses.
- Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.
- Jumlah internal fraud yang telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh BPR tercermin sebagaimana tabel sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah	Nihil	Nihil

mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik yang Telah Dilakukan Oleh PT. BPR Sabar Artha Prima selama Tahun 2025 Sebagai Berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2						
3						

BAB IV

PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) di PT. BPR Sabar Artha Prima selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan up-date terhadap laporan ini.

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2025 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sabar Artha Prima dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban serta kewajaran dari BPR itu sendiri.

Surakarta, 27 April 2026
PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA

Sunaryo, SE
Direktur

BAB IV

PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) di PT. BPR Sabar Artha Prima selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan up-date terhadap laporan ini.

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2025 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sabar Artha Prima dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban serta kewajaran dari BPR itu sendiri.

Surakarta, 27 April 2026
PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA



Sunarvo, SE
Direktur